

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR  
KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU  
TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI SE-KECAMATAN  
SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Jejen Zainul Hakim**

Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  
YPPT Priatim Tasikmalaya  
e-mail: [jean07zh@gmail.com](mailto:jean07zh@gmail.com)

**ABSTRAK**

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini termasuk merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan angket. Teknik analisis data dilakukan melalui uji regresi yaitu untuk mengetahui besar pengaruh implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian besarnya pengaruh implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh *tractability of the problem* (risalah tentang tingkat kesulitan permasalahan yang akan dikendalikan), *ability of policy decision to structure implementation* (kemampuan-keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasinya secara tepat) dan *non-statutory variables affecting implementation* (variabel-variabel di luar kebijakan/ peraturan perundangan yang mempengaruhi implementasinya).

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi, kinerja guru.

**ABSTRACT**

*Teachers at Junior High Schools or Madrasah Tsanawiyah or other forms of equivalent, must have a minimum academic qualification of four diploma or bachelor study programs that are appropriate to the subjects taught / supported, and are obtained from study programs that are accredited. This study aims to*

*determine the effect of the Implementation of Academic Qualification Standards and Teacher Competency Policy on the Performance of Teachers of Public Middle Schools in the District of Sodonghilir, Tasikmalaya Regency.*

*This research includes associative research, namely research conducted to determine the relationship of two or more variables. Data collection techniques were carried out through observation, documentation studies and questionnaires. Data analysis technique is done through a regression test that is to determine the effect of the implementation of the Academic Qualification Standards and Teacher Competence policies on the performance of Teachers of Public Middle Schools in the District of Sodonghilir, Tasikmalaya Regency*

*Based on the results of the study the magnitude of the influence of the implementation of the Academic Qualification Standards and Teacher Competence policies on the performance of Teachers of Public Middle Schools in the Sodonghilir District of Tasikmalaya Regency is determined by the tractability of the problem, the ability of the policy decision to structure implementation and non-statutory variables that have implemented.*

*Keywords: Implementation of policies, Academic Qualification Standards and Competencies, teacher performance.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kemajuan terhadap dunia pendidikan, dimana salah satunya terkait dengan peningkatan guru dan dosen sebagai tenaga pendidik, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan menyebutkan diterbitkannya peraturan tersebut atas pertimbangan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Guru memiliki peran penting sebagai tenaga pendidik untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam pasal 8 perundang-undangan tersebut di atas dengan disebutkan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam Pasal 9 berbunyi “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”, dan pada pasal 10 berbunyi “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Tindaklanjut dari perundang-undangan tersebut di atas, sebagai upaya penguatan eksistensi dari seorang guru, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan dalam peraturan tersebut guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru merupakan tenaga profesional, yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Menurut Permendiknas tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dijelaskan pula bahwa pentingnya prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Seorang Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendiknas tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dijelaskan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Berkaitan dengan penelitian ini dalam ruang lingkup pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), dijelaskan bahwa Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan pentingnya seorang guru memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, sehingga seorang guru mampu melaksanakan tugas secara profesional sebagai tenaga pendidik. SMP Negeri yang berada di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi

beberapa kendala dalam melaksanakan kebijakan terkait Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru sehingga mempengaruhi kinerja para guru.

## LANDASAN TEORI

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, istilah tersebut dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jones (Rusli, 2015, p. 33) menyatakan bahwa “Kebijakan adalah unsur-unsur atau ekspresi-ekspresi dari program-program atau keputusan-keputusan”. Setiap kebijakan harus dapat diimplementasikan. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang telah dirumuskan (*policy formulation*). Dalam pelaksanaan itu diperlukan berbagai aktivitas termasuk penyiapan, pelaksanaan, sosialisasi, peningkatan kapasitas (aparatur pemerintah). Berbagai tahapan sebelum pelaksanaan merupakan hal penting sebelum, bahkan selama implementasi. Jadi Implementasi adalah sebuah proses yang rumit atau kompleks dengan melibatkan berbagai aktivitas dan kegiatan serta berbagai macam pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahapan perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif, memungkinkan birokrasi untuk bertindak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Easton (Islamy, 2007, p. 28) memberikan pendapatnya tentang kebijakan publik dengan mengemukakan sebagai berikut ::

Suatu kebijakan publik itu bersifat otoritatif, yaitu nilai-nilai yang dialokasikan dan dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh masyarakat. Namun, karena tugas negara dan pejabat negara adalah untuk melayani dan meningkatkan kebutuhan masyarakat, maka sistem nilai masyarakat yang telah diartikulasi menjadi kepentingan atau kebutuhan masyarakat harus benar-benar dijadikan pedoman bagi pejabat negara dalam membuat kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau gagasan serta pendapat para pejabat yang mewakili masyarakat, melainkan opini publik juga memiliki porsi yang sama untuk dijadikan masukan dalam kebijakan, sehingga kebijakan publik tersebut berorientasi pada kepentingan publik.

Kebijakan publik berdasarkan pendapat di atas mengisyaratkan bahwa suatu kebijakan merupakan otoritas pemerintah untuk memberikan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa terhadap masalah-masalah publik, namun demikian pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan atas kebijakan yang telah diputusan tersebut karena kebijakan yang dibuat merupakan kebijakan yang

berorientasi kepada kepentingan publik. Van Meter dan Van Horn (Rusli, 2015, p. 91) memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan dengan mengemukakan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Kesimpulan tentang implementasi kebijakan (Rusli, 2015, p. 82) dengan menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang kompleks, yang melibatkan berbagai bentuk kegiatan, berbagai aktor atau pihak, terkait dengan lingkungan atau konteks dimana kebijakan itu hendak diterapkan untuk mencapai tujuannya. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik yang berasal dari sisi internal atau eksternal, baik yang berasal dari bawah atau dari atas, baik yang vertikal maupun horizontal, baik yang nampak (*tangible*) atau tidak nampak (*intangible*). Semua faktor itu memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam proses pelaksanaan kebijakan, dan masing-masing faktor itu bisa disederhanakan dalam bentuk model untuk melihat bagaimana faktor-faktor pengaruh tersebut berperan dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Suatu kebijakan harus dapat diimplemetnasikan atau dilaksanakan, hal tersebut sebagaimana dinyatakan (Winarno, 2002, p. 101) bahwa:

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, menurut Mazmanian dan Sabatier (Rusli, 2015, hal., 108-109) menyatakan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan tahapan proses implementasi. Ketiga variabel tersebut yaitu:

- 1) *Tractability of the problem* (risalah tentang tingkat kesulitan permasalahan yang akan dikendalikan) dengan indikator :
  - a. Ketersediaan teori teknis dan teknologi yang valid.
  - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran.
  - c. Prosentase kelompok sasaran dalam totalitas penduduk.
  - d. Ruang lingkup/derajat perubahan perilaku yang diinginkan.
- 2) *Ability of policy decision to structure implementation* (kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasinya secara tepat), dengan indikator:
  - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan.
  - b. Digunakannya teori kausal yang handal.
  - c. Ketepatan alokasi sumber dana.
  - d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara institusi pelaksana.
  - e. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari instansi pelaksana.
  - f. Akses formal pihak luar.

- 3) *Non-statutory variables affecting implementation* (variabel-variabel di luar kebijakan/peraturan perundangan yang mempengaruhi implementasinya), dengan indikator :
- Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi.
  - Dukungan publik.
  - Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat.
  - Dukungan dari pejabat/institusi atasan yang berwenang.
  - Komitmen dan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru sebagai upaya meningkatkan peran guru dalam peningkatan kompetensi dari seorang guru. Guru merupakan tenaga profesional sebagai tenaga pendidik di Sekolah. Menilai kinerja guru berada pada bidang garapan sumber daya manusia, yakni guru dalam fungsi pengawasan dimana salah satu komponennya adalah melakukan penilaian, sedangkan kinerja guru itu sendiri menunjuk pada bagaimana guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan penilaian hasil belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Guru merupakan tenaga kependidikan yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, melatih, serta mengarahkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat dengan bangsa lain. Oleh karena itu kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangatlah penting dalam terwujudnya visi dan misi penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dimana seorang guru melaksanakan tugasnya. Pengertian tentang guru (Djamarah, 2000, p. 31) memberikan pengertian bahwa:

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, surau, mushala, rumah, dan sebagainya.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa guru merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan dapat memberikan ilmu pengetahuannya. Lebih tegasnya (Tabrani, 1990, p. 5) mengemukakan guru merupakan seorang tenaga kependidikan yang profesional berbeda pekerjaannya dengan yang lain, karena ia merupakan suatu profesi, maka dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya .

Kinerja seorang guru dikatakan baik jika guru telah melakukan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur, dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Membahas masalah kualitas dari kinerja guru tidak terlepas dari pencapaian hasil belajar. Hal ini karena kinerja guru sangat menentukan keberhasilan proses belajar yang efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dan terwujud dari hasil belajar siswa yang baik yang pada akhirnya dapat mencetak lulusan yang berkualitas. Pengertian kinerja guru (Tabrani, 1990, p. 17) dengan mengemukakan bahwa:

Kinerja guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan penilaian.

Pengukuran kinerja seorang guru didasarkan pada standar penilaian kinerja guru, menurut Sahertian (Kusmianto, 1997, p. 49) menyatakan bahwa standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Bekerja dengan siswa secara individual
2. Persiapan dan perencanaan pembelajaran
3. Pendayagunaan media pembelajaran
4. Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar
5. Kepemimpinan yang aktif dari guru.

Tugas professional guru meliputi tugas merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai pembelajaran, berikut adalah klasifikasi keterampilan tugas professional guru:

1. Keterampilan Merencanakan Pembelajaran

Tugas-tugas guru dalam perencanaan pembelajaran meliputi kemampuan dalam memahami tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengenali perilaku siswa, mengidentifikasi karakteristik siswa, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan butir-butir tes, mengembangkan materi pelajaran, mengembangkan media dan metode pembelajaran, menerapkan sumber-sumber pembelajaran, mengkoordinasikan segala factor pendukung, mengembangkan dan melakukan penilaian awal terhadap rencana pembelajaran, merevisi pembelajaran, dan melakukan penilaian akhir terhadap rencana pembelajaran.

2. Keterampilan Melaksanakan Pembelajaran

Keterampilan ini merujuk kepada tugas professional guru dalam menciptakan satu system atau melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran, dan menutup pembelajaran. Ada 3 tugas atau aktivitas pokok dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu: membuka pembelajaran, mengelola pembelajaran, dan menutup pembelajaran.

Dalam mengelola aktivitas pembelajaran, digunakan materi dan berbagai media dan metode, sumber, dan berbagai faktor pendukung. Guru harus melakukan aktivitas strategik, yang meliputi: memberi penjelasan, ide, mendemonstrasikan, mendefinisikan, membandingkan, memotivasi, membimbing, mendisiplinkan, bertanya dan memberikan penguatan.

3. Keterampilan Menilai Pembelajaran

Tugas guru dalam menilai pembelajaran meliputi: melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah dikembangkan pada waktu merencanakan pembelajaran, melakukan modifikasi dan penskoran, dan memberikan masukan serta tindak lanjut perbaikan proses dan memberikan pembelajaran remedial.

Keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penilaian pembelajaran adalah: harus memahami metodologi penilaian

pembelajaran, antara lain teknik dan alat penilaian, kriteria penilaian yang baik, bentuk dan jenis tes, peskoran, statistik yang berhubungan dengan penilaian, serta program pelaksanaan remedial dan pengayaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan angket. Populasi dalam penelitian ini yaitu guru di SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari: SMPN 1 Sodonghilir, SMPN 2 Sodonghilir, SMPN 3 Sodonghilir, SMPN 4 Sodonghilir, SMPN SATU ATAP 1 Sodonghilir, SMPN SATU ATAP 2 Sodonghilir, dan SMPN SATU ATAP 3 Sodonghilir dengan total guru sebanyak 132 orang.

Teknik sampling digunakan yaitu *stratified random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampling didasarkan pada strata dari kelompok populasi. Jumlah responden hasil perhitungan diperoleh sebanyak 60 orang guru. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui uji regresi yaitu pengujian data untuk mengetahui besar pengaruh implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, terdapat standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga pendidik. Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal, yaitu kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK).

Berkaitan dengan penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, menurut peraturan di atas dijelaskan bahwa Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Berdasarkan dokumen dari hasil penelitian menunjukkan semua guru yang ada merupakan lulusan sarjana (S1), namun demikian dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dikarenakan keterbatasan guru, sebagian guru melaksanakan pembelajaran tidak sesuai dengan studi pendidikannya.



Keberhasilan implementasi kebijakan terkait dengan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SMP Negeri di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, dilihat dari faktor *tractability of the problem* (risalah tentang tingkat kesulitan permasalahan yang akan dikendalikan) meliputi ketersediaan secara teknis, ketersediaan teknologi dan perilaku para guru serta adanya perubahan yang diharapkan dari adanya kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fasilitas teknologi yang didengungkan saat ini belum tersedia dengan baik, sehingga para guru maupun siswa belum dapat menggunakan teknologiii informasi sebagaimana yang terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Keadaan guru dimana lebih banyak berstatus non-PNS di sekolah-sekolah SMP Negeri di Kecamatan Sodonghilir menjadi sebuah catatan tersendiri, dimana sekolah berstatus Negeri, tetapi para gurunya merupakan guru Non-PNS, bahkan dalam satu sekolah tidak ada sama sekali guru berstatus PNS.

Keadaan guru dalam setiap sekolah SMP Negeri yang ada di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Guru SMP Negeri di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

No.	Nama Sekolah	PNS	Tersertifikasi	Belum Tersertifikasi	Non PNS	Tersertifikasi	Belum Tersertifikasi	Jumlah
1	SMPN 1 Sodonghilir	16	14	2	14	0	14	30
2	SMPN 2 Sodonghilir	15	15	0	5	0	5	20
3	SMPN 3 Sodonghilir	5	5	0	12	0	12	17
4	SMPN 4 Sodonghilir	1	1	0	11	0	11	12
5	SMPN SATU ATAP 1 Sodonghilir	4	4	0	11	0	11	15
6	SMPN SATU ATAP 2 Sodonghilir	0	0	0	22	0	22	22
7	SMPN SATU ATAP 3 Sodonghilir	0	0	0	16	1	15	16
	Jumlah	41	39	2	91	1	90	132

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan perlu memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan guru pada setiap sekolah, dimana masih adanya sekolah yang tidak ada guru berstatus PNS, padahal sekolah tersebut merupakan sekolah berstatus negeri. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap guru perlu didorong dan diberikan motivasi untuk dapat meningkatkan kompetensinya, agar dapat meningkatkan kualitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, termasuk akses terhadap teknologi informasi, sehingga baik guru maupun para siswa tidak tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi yang sangat berkembang pesat saat ini.

Faktor selanjutnya dilihat dari *ability of policy decision to structure implementation* (kemampuan-keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasinya secara tepat), dengan indikator adanya kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, ketepatan alokasi sumber dana, adanya keterpaduan dalam sekolah, dan adanya komitmen dari pemangku kebijakan, dimana hasil penelitian belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja para guru SMP Negeri yang ada di Kecamatan Sodonghilir

Kabupaten Tasikmalaya. Diperlukan adanya komitmen bersama seluruh *stakeholders* pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan beserta peningkatan kompetensi para guru yang ada di SMP Negeri yang ada di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Faktor terakhir yaitu *non-statutory variables affecting implementation* (variabel-variabel di luar kebijakan/ peraturan perundangan yang mempengaruhi implementasinya) melalui indikator adanya dukungan secara ekonomi dari masyarakat setempat, juga adanya dukungan teknologi sebagai pendukung proses pembelajaran, serta adanya dukungan dari para pemangku kebijakan, dan terakhir adanya komitmen dari pimpinan sekolah masing-masing, hasil penelitian juga belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja para guru di SMP Negeri yang ada di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan dukungan Kepala Sekolah dari setiap sekolah menjadi sangat penting, agar kinerja para guru dapat meningkat sehingga kualitas pendidikan juga dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan alat bantu program statistik, untuk mengetahui besar pengaruh implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya diperoleh hasil statistik sebagai berikut:

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799 <sup>a</sup>	.639	.633	1.67478

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pengujian data diperoleh angka Rsquare sebesar 0,639 (0,799 x 0,799 = 0,639), dimana Rsquare dapat disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti sebesar 63,9% kinerja guru SMPN se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan oleh adanya kebijakan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sedangkan sisanya (100% - 63,9 % = 36,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti. Nilai Rsquare berkisar antara 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil R square, semakin lemah hubungan kedua variabel.

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	287.900	1	287.900	102.643	.000 <sup>a</sup>
	Residual	162.683	58	2.805		
	Total	450.583	59			

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

b. Dependent Variable: Kinerja Guru SMPN se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan tabel uji Anova (*Analisis of Varians*) atau F test, didapat  $F_{hitung}$  sebesar 102,643 dengan tingkat signifikansi 0,000, hal tersebut menunjukkan karena nilai probabilitas (0,000) jauh di bawah 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kinerja guru SMPN se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, atau dengan kata lain implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	3.927	1.252		3.138	.003
Implementasi Kebijakan	.318	.031	.799	10.131	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru SMPN se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

Data penelitian ini menggunakan teknik sampling sehingga hasil penelitian perlu dilakukan uji banding, yaitu membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dan nilai  $t_{tabel}$ , dimana apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ , maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.138, dan nilai  $t_{tabel}$  ( $df-2$  atau  $60-2 = 58$ ), maka berdasarkan daftar nilai  $t$  dengan taraf signfiikansi 0.05 ( $\alpha=5\%$ ), diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,672, sehingga hal tersebut menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.138 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,672. Dengan demikian implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru berpengaruh terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dapat teruji secara empirik.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru berdasarkan hasil penelitian berpengaruh terhadap kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan perlu memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru sehingga kualitas pendidikan di SMP Negeri se-Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dapat meningkat sesuai yang diharapkan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamarah, S. B. (2000). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, I. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusmianto. (1997). *Panduan Penilaian Kinerja Guru Oleh Pengawas*. Jakarta: Erlangga.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Cimahi: Hakim Publishing.
- Tabrani, R. (1990). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Yayasan Karya.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.